



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Nanang Fatchurochman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nizar
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 60% (persen).

Semarang, 18 Desember 2023

Pihak Pertama,

Nanang Fatchurochman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
				VOL	SATUAN
1	SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	IKSK.1.1 Nilai kinerja penyuluhan agama;	75	Nilai
			IKSK.1.2 Persentase penyuluhan agama yang dibina;	85	%
			IKSK.1.3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;	100	Org
			IKSK.1.4 Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan;	200	Kelompok
2	SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	IKSK.2.1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;	80	%
			IKSK.2.2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina;	275	Org
			IKSK.2.3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.	2	Lokasi
3	SK.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	IKSK.3.1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;	7	Lbg
			IKSK.3.2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.	25	Keg
4	SK.4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	IKSK.4.1 Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.	100	%
5	SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	IKSK.5.1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;	80	%
			IKSK.5.2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	75	Lokasi
6	SK.6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama	IKSK.6.1 Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat.	100	%
7	SK.7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	IKSK.7.1 Persentase rumah ibadah yang ramah;	60	%
			IKSK.7.2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;	75	%
			IKSK.7.3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.	85	Lokasi
8	SK.8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan	IKSK.8.1 Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.	350	Keg/ Konten
9	SK.9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam	IKSK.9.1 Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90	%

		mata pelajaran agama di ruang publik dan pendidikan diniyah & pesantren	IKSK.9.2	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	95	%
			IKSK.9.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	75	%
			IKSK.9.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	75	%
			IKSK.9.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	75	%
			IKSK.9.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	85	%
			IKSK.9.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	85	%
			IKSK.9.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	65	%
			IKSK.9.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	65	%
			IKSK.10.1.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	65	Keg
			IKSK.11.1.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.	65	Keg
			IKSK.12.1.	Persentase pesantren yang berwawasan moderat;	65	%
10	SK.10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	IKSK.10.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	15	Keg
11	SK.11	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	IKSK.11.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak);	15	Unit
12	SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	IKSK.12.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll);	60	Keg
13	SK.13	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	IKSK.13.1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;	45	dokumen
			IKSK.13.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.	42	Org
14	SK.14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan	IKSK.14.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	164	Unit
			IKSK.14.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	500	Eksemplar
			IKSK.14.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	70	%

			IKSK.14.4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	10	Layanan
			IKSK.14.5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	100	Lokasi
			IKSK.14.6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;	50	Org
15	SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	IKSK.15.1 Jumlah KUA yang direvitalisasi;	1	KUA
			IKSK.15.2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;	5	KUA
			IKSK.15.3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;	28000	Org
			IKSK.15.4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;	550	Org
			IKSK.15.5 Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.	65	penghulu
16	SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	IKSK.16.1 Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinh/kristiani/bahagia/sukinh/hitta sukhaya	95	Pasangan
17	SK.17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	IKSK.17.1 Perentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	85	%
18	SK.18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.18.1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;	100	%
			IKSK.18.2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	20	%
19	SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	IKSK.19.1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;	80	%
			IKSK.19.2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.	100	%
20	SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	IKSK.20.1 Perntase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.	100	%
21	SK.21	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	IKSK.21.1 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service).	80	%
22	SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	IKSK.22.1 Persentase amil yang dibina	55	%
			IKSK.22.2 Persentase lembaga zakat yang dibina.	55	%
23	SK.23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	IKSK.23.1 Persentase lembaga wakaf yang dibina;	95	%
			IKSK.23.2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	75	%
			IKSK.23.3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.	80	%
24	SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan	IKSK.24.1 Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	65	%

		pola pembelajaran inovatif	IKSK.24.2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	65	%
			IKSK.24.3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	75	%
			IKSK.24.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	80	Madrasah
			IKSK.24.5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.	5	Lembaga
25	SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	IKSK.25.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	65	%
			IKSK.25.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;	5	Org
			IKSK.25.3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;	6	Keg
			IKSK.25.4	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan.	80	%
26	SK.26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	IKSK.26.1	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;	65	%
			IKSK.26.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.	65	%
27	SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	IKSK.27.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nav Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	75	%
			IKSK.27.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	55	%
			IKSK.27.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	55	%
			IKSK.27.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	55	%
			IKSK.27.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;	55	%
			IKSK.27.6	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.	65	%
28	SK.28	Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu	IKSK.28.1	Jumlah Siswa Penerima BOS Pada Madrasah	159495	Siswa
			IKSK.28.2	Jumlah Siswa Keagamaan Penerima BOS	354	Siswa
29	SK.29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	IKSK.29.1	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.	30	%

30	SK.30	Meningkatnya Bantuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	IKSK.30.1 IKSK.30.2 IKSK.30.3	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ; Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.	20 50 85	%
31	SK.31	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	IKSK.31.1 IKSK.31.2	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal; Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.	85 85	%
32	SK.32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	IKSK.32.1 IKSK.32.2 IKSK.32.3 IKSK.32.4	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG; Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1; Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.	90 85 80 65	%
33	SK.33	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	IKSK.33.1	ah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	25	Lembaga
34	SK.34	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	IKSK.34.1	entase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	5	%
35	SK.35	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	IKSK.35.1 IKSK.35.2 IKSK.35.3	Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran; Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.	45 15 70	%
36	SK.36	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	IKSK.36.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	10	Lembaga
37	SK.37	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.37.1 IKSK.37.2 IKSK.37.3	Persentase produk hukum yang diterbitkan; Persentase kasus hukum yang terselesaikan; Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.	35 80 145	%
38	SK.38	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	IKSK.38.1	Persentase rekomendasi izin orang asing	70	%

39	SK.39	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.39.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;	80 %
			IKSK.39.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;	10 %
			IKSK.39.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;	75 %
			IKSK.39.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);	85 %
			IKSK.39.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;	80 %
			IKSK.39.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;	80 %
			IKSK.39.7	Persentase data ASN yang diupdate;	50 %
			IKSK.39.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.	50 %
40	SK.40	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	IKSK.40.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;	75 dokumen
			IKSK.40.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);	85 %
			IKSK.40.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;	85 %
			IKSK.40.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.	90 %
41	SK.41	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	IKSK.41.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;	85 %
			IKSK.41.2	Persentase tanah yang bersertifikat;	99 %
			IKSK.41.3	Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN.	85 %
42	SK.42	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	IKSK.42.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;	75 %
			IKSK.42.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;	85 %
			IKSK.42.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	85 %
43	SK.43	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.43.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;	80 %
			IKSK.43.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	64 Satker
			IKSK.43.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.	20 Org
44	SK.44	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.44.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data;	75 %
			IKSK.44.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;	90 %

			I KSK.44.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	75	%
45	SK.45	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	I KSK.45.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	85	%
			I KSK.45.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.	85	%
46	SK.46	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	I KSK.46.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;	85	%
47	SK.47	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	I KSK.47.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	90	%
			I KSK.47.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;	90	%
			I KSK.47.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;	90	%
			I KSK.47.4	Persentase menurunnya lelang gagal;	90	%
			I KSK.47.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.	30	%
48	SK.48	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	I KSK.48.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;	95	%
49	SK.49	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	I KSK.49.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;	95	Kegiatan
			I KSK.49.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.	95	%
50	SK.50	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	I KSK.50.1	Persentase Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.	95	%

Nilai Kinerja Anggaran : 95

PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN
TA 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
	KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	<i>Dalam Ribu Rupiah</i>
		381.053.850
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	67.363.052
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	315.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	467.730
2104	Pengelolaan Kantor Urusan Agama dan Pembinaan Keluarga Sakinah	13.791.762
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	551.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	994.800
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	554.500
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.660.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	958.844
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	691.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	1.547.690
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	63.340
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	44.781.878
2148	Pembinaan Haji	985.508
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	49.110.379
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	45.996
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	380.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	13.993.017
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	70.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	450.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	6.692.614
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	160.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	18.158.507
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	3.915.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.705.468
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	297.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	110.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	175.756
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	242.765
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	57.200
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	275.840
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	5.520
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	220.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	2.155.696
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	223.925.114
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	45.000

2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	13.218.793
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	202.843.000
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	334.520
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	2.130.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Kristen	1.242.618
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	2.293.440
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	416.263
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	1.401.480
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	40.655.305
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	6.140.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	34.072.005
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	73.800
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	280.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	89.500



Semarang, 18 Desember 2023

Pimpinan Satuan Kerja.

Nanang Fatchurochman